

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI DKI JAKARTA: ANALISIS PERIODE 2019–2024

Eben Ezer Sihombing, Milton Pakpahan

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Pemerintahan

Email Korespondensi : ebenezersihombing1311@gmail.com

Abstrak: Permasalahan sampah di Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup. Tingginya volume timbulan sampah serta kompleksitas pengelolaannya mendorong perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan masyarakat melalui pendekatan Collaborative Governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan model Collaborative Governance Ansell dan Gash yang meliputi Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to Process, Shared Understanding, dan Intermediate Outcomes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui koordinasi lintas sektor, program bank sampah, edukasi masyarakat, dan kemitraan dengan sektor swasta. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta koordinasi antarlembaga yang perlu diperkuat. Oleh karena itu, penguatan komunikasi, komitmen bersama, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci : Collaborative; Governance; Sampah; Partisipasi; Masyarakat

Abstract: Waste management in the Special Capital Region of Jakarta has become one of the major challenges in public service delivery in the environmental sector. The increasing volume of waste, limited processing capacity, and the complexity of stakeholder involvement require the implementation of Collaborative Governance involving government institutions, the private sector, academia, communities, and the public. This study aims to analyze the implementation of Collaborative Governance in waste management in the Special Capital Region of Jakarta and identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. This study employed a qualitative approach using library research. Data were collected through documentation and literature review and analyzed using Ansell and Gash's Collaborative Governance model, consisting of Face-to-Face Dialogue, Trust Building, Commitment to Process, Shared Understanding, and Intermediate Outcomes. The findings indicate that collaboration has been implemented through inter-agency coordination, waste bank programs, public education, and partnerships with the private sector. However, implementation has not yet been fully optimized due to limited public participation, inadequate infrastructure, and weak inter-agency coordination. Strengthening communication, mutual trust, and stakeholder participation is essential to achieving effective and sustainable waste management.

Keywords: Collaborative; Governance; Waste; Participation; Public.

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang menjadi perhatian utama di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas masyarakat, DKI Jakarta menghasilkan timbulan sampah dalam jumlah yang sangat besar setiap hari. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah terus meningkat sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Tabel 1. Perkembangan Timbulan Sampah di Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Timbulan Sampah (Juta Ton / Tahun)	Keterangan
2019	2,01	Awal periode analisis
2020	2,50	Meningkatkan akibat aktivitas perkotaan
2021	3,08	Peningkatan volume sampah
2022	3,11	Cenderung stabil
2023	3,13	Sedikit meningkat
2024	3,17	Tren kenaikan berlanjut

Sumber : Diolah dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Tren peningkatan timbulan sampah memperlihatkan semakin besarnya tantangan pengelolaan sampah di DKI Jakarta sehingga diperlukan kolaborasi berbagai pihak.

Pengelolaan sampah tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Kompleksitas permasalahan menuntut keterlibatan berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan Collaborative Governance sebagai bentuk tata kelola kolaboratif yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, hingga evaluasi pengelolaan sampah.

Menurut Ansell dan Gash (2008), Collaborative Governance merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan lembaga pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam forum bersama yang berorientasi pada konsensus untuk menyelesaikan permasalahan. Selain model Ansell dan Gash (2008), Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) mengembangkan kerangka integratif Collaborative Governance yang melihat kolaborasi dalam konteks sistem yang lebih luas, rezim tata kelola kolaboratif, dinamika kolaborasi, tindakan kolaboratif, serta dampak dan adaptasi. Kerangka tersebut menegaskan bahwa kolaborasi dipengaruhi oleh kondisi dan faktor pendorong dalam lingkungan kebijakan serta

kemampuan para aktor untuk membangun keterlibatan, motivasi bersama, dan kapasitas bertindak secara bersama. Kerangka Emerson et al. (2012) digunakan dalam penelitian ini sebagai perspektif pendukung untuk memperkuat pemahaman mengenai dinamika kolaborasi, sedangkan analisis utama tetap menggunakan lima indikator proses kolaboratif Ansell dan Gash (2008).

Dalam konteks pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta, pendekatan ini menjadi penting karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi tingginya volume sampah dan keterbatasan kapasitas pengolahan. Kolaborasi yang efektif diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menghasilkan pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan Collaborative Governance dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, kepercayaan antarpemangku kepentingan, komitmen bersama, serta adanya tujuan yang sama. Namun demikian, implementasinya di DKI Jakarta masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai penerapan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian Avitadira dan Indrawati (2023) menganalisis Collaborative Governance dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta tahun 2021. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan studi lapangan serta menggunakan tahapan Collaborative Governance Morse dan Stephens. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta telah terlaksana, tetapi belum optimal. Tahap inisiasi dan deliberasi antara pemerintah dan masyarakat belum terlaksana dengan baik sehingga proses kolaborasi belum berjalan secara optimal (Avitadira & Indrawati, 2023).

Penelitian Arif, Subowo, dan Kismartini (2024) mengkaji Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Jakarta Timur melalui studi pada Bank Sampah Jalak Green Collection. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan teori Ansell dan Gash, dengan temuan bahwa lima dimensi proses kolaborasi telah diterapkan cukup baik. Namun, masih terdapat kendala pada komitmen terhadap proses, terutama keterbatasan sarana dan prasarana serta ketidakstabilan harga sampah yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat (Arif et al., 2024). Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, artikel ini menempatkan kajian pada lingkup pengelolaan sampah Provinsi DKI Jakarta secara lebih luas dengan menggunakan studi pustaka dan menganalisis periode 2019–2024 berdasarkan model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan model Ansell dan Gash, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis penerapan Collaborative

Governance dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan berbagai sumber tertulis yang relevan. Periode analisis dalam penelitian ini adalah 2019–2024, sesuai dengan rentang data perkembangan timbulan sampah dan literatur yang digunakan dalam pembahasan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, dokumen resmi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, serta sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Collaborative Governance dan pengelolaan sampah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, serta menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian mengacu pada teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008) yang terdiri atas lima indikator yaitu Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to Process, Shared Understanding, dan Intermediate Outcomes. Kelima indikator tersebut digunakan untuk menganalisis bentuk kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta

Tabel 2. Aktor dalam Collaborative Governance Pengelolaan Sampah

Aktor	Peran	Bentuk Kolaborasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Penyusun Kebijakan	Regulasi dan koordinasi
Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana teknis	Pengelolaan Sampah
Sektor Swasta	Mitra	CSR, teknologi, investasi
Akademisi	Penelitian	Rekomendasi Kebijakan
Komunitas Lingkungan	Edukasi	Kampanye dan Pendampingan
Masyarakat	Partisipasi	Pemilahan sampah dan bank sampah

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan studi pustaka

Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas masyarakat di Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya volume timbulan sampah setiap hari sebagai konsekuensi dari aktivitas rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industri, serta sektor jasa. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, di antaranya melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor

81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta berbagai kebijakan daerah yang mendorong pengurangan sampah dari sumber. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengembangkan program bank sampah, penerapan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R), serta menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah di DKI Jakarta tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan sektor swasta, akademisi, komunitas lingkungan, organisasi masyarakat, dan masyarakat sebagai penghasil sampah. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan kolaboratif agar setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan peran dan kapasitasnya. Oleh karena itu, pendekatan Collaborative Governance menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana proses kolaborasi tersebut dilaksanakan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Meskipun berbagai kebijakan dan program telah diterapkan, berbagai kajian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di DKI Jakarta masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya volume timbulan sampah, keterbatasan kapasitas fasilitas pengolahan, belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber, serta masih perlunya peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kolaboratif yang dibangun oleh seluruh pihak yang terlibat.

Analisis Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Model Ansell dan Gash (2008)

Face to Face Dialogue (Dialog Tatap Muka)

Tabel 3. Analisis Collaborative Governance Berdasarkan Ansell dan Gash

Indikator	Kondisi di DKI Jakarta	Analisis
Face to Face Dialogue	Forum koordinasi telah dilaksanakan	Komunikasi antaraktor sudah berjalan namun perlu ditingkatkan
Trust Building	Kemitraan pemerintah dan masyarakat mulai berkembang	Kepercayaan perlu diperkuat melalui transparansi
Commitment to Proses	Terdapat berbagai regulasi	Implementasi masih menghadapi kendala
Shared Understanding	Edukasi lingkungan telah dilakukan	Pemahaman masyarakat belum merata
Intermediate outcomes	Program Bank Sampah berkembang	Hasil positif, tetapi masih perlu evaluasi

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan Ansell dan Gash (2008) dan hasil analisis literatur

Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa Face to Face Dialogue merupakan tahapan awal dalam proses Collaborative Governance. Dialog tatap muka menjadi sarana bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun komunikasi secara langsung, menyampaikan kepentingan masing-masing, mengurangi kesalahpahaman, serta menciptakan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan permasalahan publik. Melalui dialog yang dilakukan secara terbuka dan berkesinambungan, setiap aktor memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, bertukar informasi, dan merumuskan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam konteks pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta, dialog antarpemangku kepentingan merupakan salah satu unsur penting mengingat kompleksitas persoalan persampahan tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah. Pengelolaan sampah melibatkan berbagai aktor, antara lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kota administrasi, sektor swasta, pengelola fasilitas pengolahan sampah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas lingkungan, serta masyarakat sebagai penghasil sampah. Masing-masing aktor memiliki kepentingan, sumber daya, dan tanggung jawab yang berbeda sehingga diperlukan forum komunikasi yang mampu menyatukan persepsi dan membangun kesepakatan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai dokumen kebijakan dan penelitian terdahulu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai bentuk komunikasi dan koordinasi melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah, forum konsultasi publik, sosialisasi kebijakan, kegiatan edukasi lingkungan, serta kerja sama dengan berbagai komunitas peduli lingkungan. Forum-forum tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi antarlembaga, memperkuat partisipasi masyarakat, dan menyosialisasikan berbagai kebijakan terkait pengurangan sampah dari sumber, pengembangan bank sampah, serta penerapan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R).

Selain pemerintah, sektor swasta juga berperan melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), terutama dalam mendukung penyediaan sarana pengelolaan sampah, edukasi lingkungan, dan pengembangan inovasi pengolahan sampah. Akademisi memberikan kontribusi melalui penelitian dan rekomendasi kebijakan, sedangkan komunitas lingkungan berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi dan pendampingan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa dialog menjadi media untuk menyelaraskan tujuan dan membangun komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Namun demikian, hasil analisis literatur juga menunjukkan bahwa pelaksanaan dialog belum sepenuhnya optimal. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa koordinasi antarinstansi masih menghadapi tantangan berupa perbedaan prioritas program, keterbatasan komunikasi lintas sektor, serta belum meratanya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun evaluasi kebijakan. Selain itu, intensitas komunikasi yang belum konsisten dapat menghambat proses penyelesaian berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat dipahami bahwa Face to Face Dialogue telah dilaksanakan sebagai bagian dari penerapan Collaborative Governance dalam pengelolaan

sampah di Provinsi DKI Jakarta, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan forum koordinasi, peningkatan kualitas komunikasi, serta perluasan partisipasi seluruh pemangku kepentingan agar proses kolaborasi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

1. Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Menurut Ansell dan Gash (2008), Trust Building merupakan proses membangun rasa saling percaya antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi. Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan kerja sama yang efektif karena tanpa adanya kepercayaan, setiap pihak akan cenderung mempertahankan kepentingannya sendiri sehingga tujuan bersama sulit tercapai. Proses membangun kepercayaan tidak terjadi secara instan, tetapi berkembang melalui komunikasi yang intensif, keterbukaan informasi, konsistensi pelaksanaan program, dan pengalaman kerja sama yang berkelanjutan.

Dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta, pembangunan kepercayaan dilakukan melalui pelibatan berbagai aktor dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan persampahan. Pemerintah daerah berupaya membangun hubungan kemitraan dengan sektor swasta, akademisi, komunitas lingkungan, organisasi masyarakat, dan masyarakat melalui berbagai program pengurangan sampah, pengembangan bank sampah, serta kampanye peningkatan kesadaran lingkungan. Pelibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menciptakan rasa memiliki terhadap program pengelolaan sampah sehingga tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pemerintah.

Kepercayaan juga dibangun melalui transparansi dalam penyusunan kebijakan, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta pemberian ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan program. Dalam beberapa penelitian terdahulu dijelaskan bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik mampu meningkatkan partisipasi masyarakat karena masyarakat merasa dihargai sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.

Walaupun demikian, pembangunan kepercayaan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya percaya terhadap efektivitas program pengelolaan sampah sehingga partisipasi dalam pemilahan sampah maupun kegiatan bank sampah belum merata. Di sisi lain, koordinasi antarinstansi yang belum optimal juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan antarpemangku kepentingan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kepercayaan memerlukan komitmen jangka panjang, konsistensi pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, indikator Trust Building dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan adanya perkembangan positif, namun masih memerlukan penguatan melalui peningkatan transparansi, komunikasi yang berkesinambungan, akuntabilitas pelaksanaan program, serta penguatan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari tata kelola kolaboratif.

Berdasarkan hasil analisis berbagai penelitian terdahulu, kepercayaan antar pemangku kepentingan terus berkembang seiring meningkatnya intensitas komunikasi dan keterlibatan dalam pelaksanaan program. Namun demikian, beberapa kajian juga menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan berupa perbedaan kepentingan, koordinasi yang belum optimal,

serta belum meratanya partisipasi masyarakat di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kepercayaan merupakan proses yang memerlukan komitmen jangka panjang dan konsistensi dari seluruh pihak.

Oleh karena itu, penguatan transparansi, akuntabilitas, komunikasi yang berkesinambungan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta.

2. Commitment to Process

Commitment to Process merupakan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif dalam setiap tahapan kolaborasi. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa komitmen tidak hanya ditunjukkan melalui kesediaan untuk bekerja sama, tetapi juga melalui konsistensi dalam menjalankan peran, mematuhi kesepakatan, serta berupaya mencapai tujuan bersama.

Analisis terhadap berbagai dokumen kebijakan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan berbagai regulasi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam upaya pengurangan sampah melalui penerapan prinsip 3R, pengembangan bank sampah, serta peningkatan kapasitas pengolahan sampah. Selain pemerintah, sektor swasta juga menunjukkan komitmen melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), sedangkan komunitas lingkungan berperan aktif dalam kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Meskipun demikian, hasil analisis literatur menunjukkan bahwa tingkat komitmen setiap aktor belum sepenuhnya sama. Beberapa penelitian mengidentifikasi masih adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya, perbedaan prioritas program, dan belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari sumber masih memerlukan peningkatan melalui edukasi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, keberhasilan Commitment to Process memerlukan penguatan koordinasi, pembagian peran yang jelas, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten.

3. Shared Understanding

Shared Understanding merupakan kesamaan pemahaman mengenai tujuan, peran, dan manfaat kolaborasi yang dibangun oleh seluruh pemangku kepentingan. Menurut Ansell dan Gash (2008), keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh adanya visi bersama yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan program.

Berdasarkan analisis berbagai dokumen dan penelitian terdahulu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengurangan sampah melalui edukasi lingkungan, sosialisasi kebijakan, pembentukan bank sampah, serta kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Program-program tersebut menunjukkan adanya upaya membangun kesamaan persepsi bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab

bersama.

Namun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat masih beragam. Sebagian masyarakat telah menerapkan pemilahan sampah dan berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah, sementara sebagian lainnya masih memandang pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah. Perbedaan tingkat pemahaman ini menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan Collaborative Governance. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendidikan lingkungan, serta penguatan komunikasi publik agar seluruh pemangku kepentingan memiliki persepsi yang sama mengenai pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis studi pustaka dan analisis dokumen, dapat disimpulkan bahwa penerapan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan adanya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup, sektor swasta, akademisi, komunitas lingkungan, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pengurangan sampah, pengembangan bank sampah, edukasi lingkungan, serta kemitraan dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Berdasarkan model Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), kelima indikator telah menunjukkan implementasi dalam pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Face to Face Dialogue tercermin melalui forum koordinasi, sosialisasi, dan komunikasi antarpemangku kepentingan dalam pelaksanaan program persampahan. Trust Building dibangun melalui kemitraan dan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat dalam berbagai program pengelolaan sampah. Commitment to Process terlihat dari adanya regulasi, kebijakan, dan berbagai program yang menunjukkan komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Shared Understanding diwujudkan melalui upaya membangun kesamaan persepsi mengenai pentingnya pengurangan sampah dari sumber serta penerapan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Sementara itu, Intermediate Outcomes terlihat dari berkembangnya program bank sampah, meningkatnya edukasi lingkungan, dan semakin luasnya kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan sampah.

Meskipun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa penerapan Collaborative Governance masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang masih ditemukan antara lain meningkatnya volume timbunan sampah, keterbatasan kapasitas pengolahan, belum meratanya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, serta perlunya penguatan koordinasi antarlembaga. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi masih perlu ditingkatkan agar mampu menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang lebih optimal.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan transparansi dan komunikasi antarpemangku kepentingan, pengembangan inovasi dalam pengelolaan sampah, serta peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat. Dengan memperkuat prinsip-prinsip Collaborative Governance, pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dalam penyelesaian

permasalahan lingkungan.

SARAN

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dan evaluasi berkala terhadap program pengelolaan sampah.
2. Partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui edukasi, penguatan bank sampah, dan penerapan prinsip 3R.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengombinasikan studi pustaka dengan penelitian lapangan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647–663.
- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative public management: New strategies for local governments*. Georgetown University Press.
- Sunu Astuti, R., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative governance dalam perspektif administrasi publik*. UNDIP Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Avitadira, K., & Indrawati, N. (2023). Upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta tahun 2021: Tinjauan collaborative governance. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 49–69. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.147>
- Arif, M. N. M., Subowo, A., & Kismartini. (2024). Collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Jakarta Timur. *Journal of Management and Public Policy*, 13(4),

- Lawado, I. R., & Dwimawanti, I. H. (2025). Proses collaborative governance pengelolaan sampah TPST Bantargebang di Kota Bekasi. *Journal of Management and Public Policy*, 14(2).
- Mahandry, S. P., & Taryana, A. (2025). Collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kota Cimahi tahun 2023–2024. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*
- Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., & Rizky, L. (2022). Model collaborative governance dalam pengelolaan sampah plastik laut guna mewujudkan ketahanan maritim di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*.